



PEMINDAHAN IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA MENURUT POLITISI DI KOTA PALEMBANG



**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik**

**Di Susun Oleh :
MUHAMMAD RIKI MARDIANSYAH
1720702039**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1442 H/ 2021**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kerjakanlah selagi itu baik di mata Allah, jangan sampai terlalai dalam melakukannya”

PERSEMBAHAN

Skripsiku ini, ku persembahkan kepada

1. Orang Tuaku tersayang Ayah Yus Aidi dan Ibu Siti Murwati
2. Saudara-saudaraku tercinta Kakak Yefri Yusmar dan Kakak Mardalyus Erison
3. Pembimbingku Bapak Kun Budianto dan Bapak Afif Mustofa Kawammi
4. Dosen-dosen prodi Ilmu Politik Fisip UIN Raden Fatah Palembang
5. Organisasiku LDK Refah UIN Raden Fatah Palembang
6. Semua pihak yang berperan dalam menyelesaikan skripsi ini

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul PEMINDAHAN IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA MENURUT POLITISI DI KOTA PALEMBANG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Politisi di Kota Palembang mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. tujuannya juga untuk mengetahui konsep terbaik yang akan di ambil oleh pemerintah dalam memindahkan ibu kota menurut politisi di Palembang. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah pusat (Presiden Joko Widodo) karna pemerintah pusat lah yang mengambil kebijakan perpindahan ibu kota ini. Teori yang digunakan dari penelitian ini adalah teori formulasi kebijakan publik. Sumber data primer adalah Politisi yang ada di kota Palembang yang di wawancara langsung, sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel-artikel, berita-berita mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimanatan Timur, masalah-masalah yang terjadi di DKI Jakarta, seperti, Banjir, Macet, Pupolasi Udara yang tidak Sehat, Krisis Air Baku, dan Potensi Ancaman Gempa Bumi di DKI Jakarta. Kebijakan ini menuai pro dan kontra atas kebijakan ini di kalangan politisi di Kota Palembang, tetapi dapat disimpulkan bahwa banyak yang setuju dengan perpindahan ini tetapi harus di perhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi kedepannya..

ABSTRACT

This research entitled MOVING THE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BY POLITICIANS IN THE CITY OF PALEMBANG. The purpose of this study was to determine the views of political experts in Palembang City regarding the movement of the capital city to East Kalimantan. the aim is also to find out the best concept that the government will adopt in moving the capital city according to political experts in Palembang. The object of this research is the central government (President Joko Widodo) because the central government has adopted the policy of moving the capital city. The theory used in this research is the theory of public policy by James A Anderson. The primary data sources were political experts in Palembang who were interviewed directly, while the secondary data in this study were articles and news about the capital's relocation to East Kalimantan. Data collection in this study was carried out using in-depth interview techniques, observation and documentation. The results showed that the reasons behind the relocation of the capital city of Indonesia to East Kalimantan were the problems that occurred in DKI Jakarta, such as floods, traffic jams, unhealthy air pollution, raw water crisis, and potential earthquake threats in DKI Jakarta. This policy reaps the pros and cons of this policy among political experts in Palembang City, but it can be concluded that many agree with this move but must take into account the impacts that will occur in the future.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Daftar Isi.....	vii
Kata Pengantar	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori	6
G. Metode Penelitian.....	13
a. Pendekatan / Metodologi Penelitian	14
b. Data dan Sumber data.....	14
c. Teknik Pengumpulan data	15
e. Teknik Analisis data	17
H. Sistematis Penulisan Laporan.....	20
BAB II Kajian Yang Relevan.....	21
A. Formulasi Kebijakan Publik.....	21

B. Implentasi Kebijakan Publik	24
C. Evaluasi Kebijakan Publik	26
D. Pemindahan Ibukota Indonesia	27
E. Ibukota	29
BAB III GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Kota Palembang	30
1. Sejarah Palembang	30
2. Awal Mula Kesultanan Palembang	31
3. Penetapan Kota Palembang	32
4. Letak Geografis	33
5. Keadaan Tipografi	36
6. Keadaan Demografi	36
7. Keadaan Ekonomi	37
8. Pengeluaran	39
9. Kota Palembang sebagai Kota Wisata.....	39
B. Politisi.....	40
1. Hagmar Bandaman	40
2. Mustafa Kamal	41
C. Anggota DPRD.....	43
1. Muhammad Ridwan	44
2. Zainal Abidin.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Latar Belakang Rencana Perpindahan Ibu Kota	47
B. Pandangan Politisi di Kota Palembang.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58

B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini :

Skripsi ini berjudul “Rencana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia menurut para Ahli Politik di Kota Palembang”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah menjadi orang tua
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang
3. Dr. Yenrizal, M.Si. Selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang
4. Ainur Ropik, M.Si. Selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang
5. Dr. Kun Budianto, M.Si. Selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan Pembimbing I
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag.,M.Hi Selaku Kepala Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
7. Rylian Chandra Eka Viana, M.A. Selaku Seketaris Prodi Ilmu Politik Fisip Uin Raden Fatah Palembang
8. Afif Mustofa Kawammi, M.Sos. Selaku Pembimbing II
9. Orang Tua, Saudara, Keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi semangat, serta dukungan bagi penulis.
10. Para Informan yang telah membantu peneliti melengkapi hasil penelitian
11. Teman-temanku dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2017 ter khusus Ilpol B Angkatan 2017
12. Organisasiku LDK Refah UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dalam penyajian tata bahasa maupun materi penulisan ilmiah. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang

karya ilmiah. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memaklumi akan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan tersebut. Namu demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

Penulis

Muhammad Riki Mardiansyah

Nim. 1720702039

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu kota negara atau *capital city* atau *political capital*, berasal dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head*), dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan (Hutasoit, 2018, hal. 110). Dalam arti lain ibu kota adalah kepala dari provinsi-provinsi yang ada di suatu negara dan menjadi pusat negara dan pusat pemerintahan.

Ibu kota mempunyai fungsi strategik, ibukota selalu menjadi target utama dalam peperangan, karena dengan menguasai ibu kota biasanya menjadi jaminan menguasai sebagian besar musuh atau penentang, paling tidak memerosotkan moral untuk mengalahkan musuh (militer) (Sutikno, 2007).

Indonesia memiliki ibu kota negaranya. Saat ini ibu kota negara Indonesia terletak di salah satu pulau besar di antara ke-lima pulau besar yang ada di Indonesia yaitu terletak di pulau Jawa lebih tepatnya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jakarta sudah sejak lama menjadi ibu kota Negara Indonesia. Bahkan, Jakarta memiliki undang-undang yang menetapkannya sebagai ibu kota negara Indonesia.

Di dalam sejarah, Indonesia sudah beberapa kali memindahkan ibu kota negaranya. pertama, pada tahun 1946 Indonesia memindahkan ibu kotanya yang awalnya di Jakarta berpindah ke Yogyakarta. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 merupakan peranan kesultanan Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Triyana, 2013, hal. 205).

Perpindahan terjadi karena pada saat itu, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia dengan melenyapkan pemerintahan RI. Aksi Belanda ditunjukan di Jakarta atas dasar bahwa suatu negara dimata internasional harus mempunya wilayah, rakyat, dan pemerintahan, sehingga Belanda mengganggu jalannya pemerintahan di Jakarta. Sehingga menyebabkan situasi di Jakarta tidak aman dan harus memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta (Triyana, 2013, hal. 206).

Alasan dipilihnya Yogyakarta pada saat itu menjadi ibu kota karena beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 5 September 1945 kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman bermaklumat bahwa seluruh rakyat Yogyakarta setia kepada negara. Dan juga sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan agar ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Sultan pun menjamin keamanan dan keselamatan para pemimpin Ri untuk melanjutkan perjuangan (Triyana, 2013, hal. 208).

kedua, ibukota negara Indonesia di pindahkan ke Bukittinggi pada tahun 1948. Bukittinggi di pilih sebagai Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI di bentuk karena mandat dari presiden Soekarno yang diberikan kepada Mr. Sjafrudin Prawinegara. Selain mandat kepada Mr. Sjafrudin

Prawinegara mandat juga diberikan kepada Mr. A.A Maramis untuk membentuk pemerintahan darurat di New Delhi apabila pemerintahan darurat gagal dibentuk di Sumatra (Usmaya, dkk, 2017, hal. 201).

Pemerintahan sendiri baru terbentuk pada tanggal 19 Desember 1948 dan secara resmi menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 1948. Peresmian tersebut dilaksanakan di Halaban dekat kabupaten Payakumbuh (Usmaya, dkk, 2017, hal. 203). Biruen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi Ibu Kota negara walau hanya seminggu lamanya (Hutasoit, 2018, hal. 109). Dan pada akhirnya setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) bubar pada tanggal 17 Agustus 1950 ibu kota kembali lagi ke Jakarta.

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Dengan alasan yang beragam. Berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara (Yahya, 2018, hal. 21).

Sebagai salah satu contoh, *Pertama*, Brazil ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. *Kedua*, pemerintahan Kore Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari seoul ke sejong, meskipun seoul itu berarti ibukota dalam bahasa korea. *Ketiga*, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat pesaingnya, seperti Nanjing yang memudar oleh Shanghai. *Keempat*, akibat menurunnya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilion dan Cahokia (Yahya, 2018, hal. 21).

Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat negara dan pusat pemerintahan yang dilindungi dalam undang-undang. Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negara melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (Hutasoit, 2018, hal. 110).

Pada tahun 2019 ada upaya untuk pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 29 April 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Sebenarnya wacana ini sudah cukup lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Soekarno wilayah Kalimantan sudah di pandang sebagai kawasan ideal bagi penempatan wilayah ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta. Selain wilayah yang luas, aman dari potensi gempa bumi, juga di anggap sebagai kawasan pertengahan Indonesia (Toun, 2018, hal. 129).

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ini tidak tanggung-tanggung membutuhkan dana hingga 466 Triliun, dengan dana sebanyak itu banyak yang beranggapan, uang dari mana 466 Triliun, apa lagi saat ini Indonesia mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020. Menurut data tersebut, presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019 (Kompas.com, 2021).

Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (Kompas.com, 2021). Salah satu tujuan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa adalah untuk memulai pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, oleh sebab itu Presiden Jokowi memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi ibu kota Indonesia yang akan datang.

Alasan Presiden Joko Widodo memilih wilayah di Penajam Utara dan Kutai Kertanegara dijadikan lokasi ibu kota baru ada 5 alasan (Subagyo, Madjid, 2019, hal. 181-182);

1. Resiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor
2. Lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893km, terpendek kedua dari 5 calon ibu kota lainnya
3. Wilayah ini ada di dekat perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda
4. Insfratuktur yang relatif lengkap
5. Di dua tempat itu tersedia lahan yang sudah di kuasai pemerintah seluas 180 hektar

Di dalam media sosial banyak sekali berita-berita yang memberitakan Ibu Kota Baru Republik Indonesia, baik itu berita secara ekonomi, politik maupun ketahanan dan keamanan negara Indonesia. Contohnya dari sektor ekonomi, kalau kita lihat banyak sekali berita di media sosial yang mengatakan kalau ibu kota pindah ke Kalimantan Timur akan meningkatkan ekonomi negara Indonesia, karena Kalimantan Timur banyak sekali potensi. Salah satunya dari sektor jasa, sektor jasa tersebut mencakup pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, jasa umum, dan lain-lain. Kalimantan Timur juga memiliki potensi besar untuk ekonomi salah satunya dari perkebunan kelapa sawit.

Dari sektor keamanan dan ketahanan juga Provinsi Kalimantan Timur relatif aman, karena populasi yang masih relatif sedikit dan Kalimantan Timur juga lebih tertutup membuat keamanan yang ada di Kalimantan Timur sedikit

lebih aman dari pada kota pada umumnya. Tetapi, ada berita-berita di media sosial beranggapan apabila ibu kota Republik Indonesia dipindahkan tidak aman. Karna, Kalimantan Timur lebih dekat dengan konflik internasional yaitu dekat dengan perairan Natuna Utara.

Dari sektor Politik pemindahan ibu kota mengalami banyak sekali polemik. Diantaranya, pemerintah belum dapat persetujuan dari DPR RI tentang UU pemindahan Ibu Kota, Presiden dianggap sangat tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia, ada lagi deal politik antara presiden Jokowi dengan rivalnya Prabowo Subianto, dan juga ada yang mengatakan presiden Jokowi kalah bersaing dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Tanggapan-tanggapan dari Politikus Nasional bahkan di Kota Palembang sendiri banyak yang setuju dan kurang setuju dengan adanya keputusan yang di ambil oleh Presiden Joko Widodo. Dari data pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politikus Di Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan di latar belakang maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Politisi kota Palembang tentang pemindahan ibu kota Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah:

1. Untuk Mengetahui latar belakang dari rencana perpindahan ibu kota Negara Indonesia.
2. Untuk Mengetahui pandangan Politisi yang ada di kota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini memiliki beberapa manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dalam penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada mahasiswa khususnya di bidang ilmu politik

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berperan dalam kebijakan politik pemerintahan pusat dalam perpindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berguna bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan judul atau tema dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai kebijakan tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, hari demi hari banyak yang sudah meneliti tentang ini. Tapi hanya sekedar tentang syarat-syarat tentang ibu kota, hanya sekedar menjelaskan itu. Dan disini peneliti bukan hanya membahas itu tapi peneliti membahas tentang perpindahan ibu kota dari perpektif Hankam, Ekonomi, dan Politik. Di antara penelitian yang sudah membahas tentang perpindahan ibu kota adalah:

Pertama, Muhammad Taufiq (2017) dengan artikelnya yang berjudul “Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi”. Artikel ini membahas tentang dampak dari perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan timur pada dampak Konektivitas Pemerataan Ekonomi. Di dalam artikelnya Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan adanya relokasi ibu kota, karena menimbulkan konsentrasi pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional baru, disertai dengan arus migrasi penduduk menuju lokasi tujuan.

Dengan adanya perpindahan ibu kota akan berdampak pada konektivitas internal dan eksternal. Konektivitas internal memungkinkan pengembangan ekonomi akan mengarah pada pembangunan wilayah kepulauan terluar lain selain pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku serta Papua. Konektivitas eksternal akan berdampak lebih positif pada kerjasama luar negeri antar kawasan di Asia Tenggara.

Di artikelnya juga Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa ibu kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran investasi dan pariwisata (Taufiq, 2017). Perbedaan diantara artikel ini dan yang akan peneliti teliti yaitu artikel ini hanya membahas tentang satu perspektif yaitu konektivitas ekonomi, sedangkan peneliti membahas dari tiga perspektif yaitu dampak ekonomi, dampak Politik dan dampak pertahanan dan keamanan negara yang akan terjadi jika Ibukota Republik Indonesia di pindahkan.

Perbedaan lain terletak di bagian metodologi yang di pakai oleh peneliti terdahulu dan yang akan digunakan oleh peneliti. Peneliti terdahulu menggunakan studi literatur dengan sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku literatur dan berita internet, dan menganalisis dilakukan dengan metode deskriptif evaluatif. Sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder.

Kedua, Diani Tri Jeniawati (Desember, 2019) dengan artikelnya berjudul “Analisis rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur” artikel ini membahas tentang analisis pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di dalam artikelnya Diani Tri Jeniawati menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan melakukan pemerataan pembangunan dan pembentukan birokrasi yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Di dalam artikelnya juga Diani menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan ibu kota Indonesia harus dipindahkan. Pertama, Kondisi Ibu kota lama (Jakarta) tidak idel lagi untuk pemerataan pembangunan nasional. Kedua, Terdapat banyak masalah yang terjadi di Jakarta. Mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, dll (Jeniawati, 2019, hal. 2).

Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Diani membahas tentang kelayakan Ibukota lama (Jakarta) dan tentang perspektif pemerataan pembangunan dan peneliti akan membahas tentang dampak-dampak dari perpindahan ibukota ke Kalimantan Timur. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti itu membahas tentang dampak-dampak atau perspektif-perspektif yang akan terjadi bila ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Ketiga, Fakhru Rozi Yamanni, Ririn Noviyanti Putri (2020) dengan artikelnya berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”. Dalam artikelnya Fakhru dan Ririn menjelaskan bahwa kebijakan untuk menangkal penyebaran virus Covid-19 yaitu PSBB yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 21 tahun 2020. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilaksanakan terpaksa berhenti (Yamali, 2020, hal. 386).

Artikel ini juga mengatakan bahwa bentuk nyata dapat dilihat dari kebijakan PSBB terhadap ekonomi yang dapat terlihat saat ini adalah PHK karena banyak kantor-kantor yang terhenti aktivitasnya karena adanya kebijakan PSBB ini (Yamali, 2020, hal. 386).

Keempat, Hanan Nugroho (Maret 2020) dengan artikelnya yang berjudul “Pemindahan ibu kota baru negara republik Indonesia ke Kalimantan Timur : strategi pemenuhan kebutuhan dan konsumsi Energi”. Dalam artikelnya Hanan Nugroho mengatakan Kalimantan memiliki cadangan bahan bakar fosil yang kaya termasuk minyak bumi.

Artikelnya juga mengatakan bahwa setidaknya yang dipilih menjadi ibu kota baru harus memiliki pemenuhan kebutuhan untuk negara dan harus memiliki konsumsi energi. Perbedaan dari apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu perspektifnya dimana peneliti akan meneliti dari berbagai perspektif sedangkan artikel ini hanya membahas tentang cadangan energi yang harus dimiliki oleh ibukota baru.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian yang penting di dalam sebuah penelitian, dengan kerangka teori penulis dapat menjelaskan secara rinci, bagaimana suatu masalah dianalisis lebih dalam melalui sebuah pola pikir, tata cara, pendekatan, pengumpulan data, hingga mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian.

a. Teori Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan di ambil kebijakannya. Dalam kaidah formulasi kebijakan, ada perencanaan formulasi yang harus dilakukan. Perencanaan formulasi merupakan perencanaan terhadap tahapan formulasi (Hayat H. , 2018, hal. 97).

Merencanakan formulasi adalah untuk mengetahui apa saja yang akan direncanakan, hasil dari perencanaan akan dibawa kemana, dampak dan implikasi dari perencanaan yang dihasilkan akan melahirkan apa, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai perbandingan sebelum perencanaan itu direncanakan (Hayat H. , 2018, hal. 97).

Sidney mengemukakan bahwa formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting karena memberikan informasi pada para analisis kebijakan dan *decision makers* mengenai : apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik (Agustino, 2017, hal. 97).

Formulasi adalah turunan dari formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijaksanaan pengembangan fase atau aktivitas (Jones, 1996, hal. 139).

Formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya. Dalam kaidah formulasi kebijakan, ada perencanaan formulasi yang harus dilakukan. Perencanaan formulasi merupakan perencanaan terhadap tahapan formulasi. Merencanakan perencanaan itu menjadi penting dalam menghasilkan sebuah konsep formulasi yang dapat dirumuskan dan diputuskan dalam kebijakan publik (Hayat, 2018, hal. 97).

Para ahli mengemukakan formulasi sebagai berikut. Menurut Woll dalam Tangkilisan Formulasi kebijakan adalah pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu pada tahap para analisis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain (Anggara, 2018, hal. 184).

Menurut Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan

berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai, termasuk pembuatan keputusan (Anggara, 2018, hal. 183).

Pelaksanaan formulasi kebijakan membutuhkan teknik dan cara yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dalam penentuan formulasinya dapat dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Makmur dan Rohana Thahier ada beberapa cara dan metode yang dapat digunakan dalam melakukan formulasi kebijakan yaitu (Hayat, 2018, hal. 98);

1. Penafsiran Fenomena

Kebijakan publik sejatinya adalah untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Solusi itu dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang baik, dilakukan berdasarkan formulasi yang baik pula yang diikuti oleh prinsip-prinsip keadilan dan komprehensifitas perencanaannya.

2. Penyusunan agenda kegiatan

Dalam penyusunan formulasi kebijakan membutuhkan konsepsi dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tindakan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyusunan formulasi tersebut dapat dimulai dari penyusunan agenda kegiatan yang merupakan program yang akan dikerjakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

3. Perumusan masalah

Setelah dilakukan agenda penyusunan agenda kegiatan, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan. Ada pula yang menyatakan bahwa masalah itu problem yang setiap individu atau kelompok pasti mengalaminya. Merumuskan masalah adalah aktivitas mengurai masalah apa yang menjadi objek kebijakan.

4. Identifikasi masalah

Perumusan masalah harus diikuti oleh identifikasi masalah atau menfokuskan persoalan yang ada, sehingga penyelesaian dapat diurai secara sistematis, terukur, terarah dan tepat sasaran. Setelah rumusan masalah diketahui, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi terhadap setiap masalah itu.

5. Pemecahan masalah

Pemecahan masalah terhadap persoalan yang menjadi rumusan masalah dalam formulasi kebijakan adalah kunci pelaksanaan kebijakan publik yang baik.

6. Teknik pertimbangan keputusan

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan semua unsur yang terlibat dalam penetapan formulasi kebijakan. Indikator-indikator apa saja yang menjadi rujukan dalam penetapan keputusan harus ditentukan sebelum keputusan diambil.

7. Penyusunan konsep kebijakan publik

Pada penyusunan konsep kebijakan publik dibutuhkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh perumus kebijakan. Selain itu, kemahiran dalam menuangkan ide dan gagasan kebijakan menentukan pula terhadap konsep kebijakan yang akan dilaksanakan.

8. sosialisasi konsep kebijakan publik

Melakukan penyusunan konsep kebijakan publik dibuktikan dengan dokumen kebijakan yang menjadi pedoman dan panduan dalam pengambilan kebijakan publik. Konsep dalam bentuk dokumen perlu disosialisasikan kepada seluruh sasaran kebijakan. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan publik.

9. Pelegalisasian kebijakan publik

Setelah dilakukan sosialisasi terhadap konsep kebijakan publik dan selesai proses perbaikan sudah dilakukan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilegalisasikan. Pelegalisasian konsep kebijakan publik menjadi jenis kebijakan publik dijadikan sebagai pedoman bagi semua stakeholder untuk menjalankan kebijakan publik tersebut secara baik dan benar.

Menurut Nicholas Henry (1975) mengelompokkan dua tipologi dalam analisis model kebijakan, yaitu kebijakan publik dianalisis dari sudut proses dan kebijakan publik dianalisis dari sudut hasil dan akibatnya. Model yang termasuk dalam kelompok penganalisisan dari sudut proses antara lain sebagai berikut (Anggara, 2018, hal. 185)

1. Model Institusional

Model ini merupakan model yang tradisional dalam proses pembuatan kebijakan publik. Fokus atau pusat perhatian model ini terletak pada struktur organisasi pemerintahan karena kegiatan politik berpusat pada lembaga pemerintahan.

2. Model Elite Massa

Menurut Nicholas Henry model ini memandang administrator pemerintahan tidak tampil sebagai pelayan rakyat tetapi bertindak sebagai penguasa. Dalam model ini, kekuasaan pemerintah berada di tangan kaum elite. Kaum elite menentukan kebijakan publik, sedangkan pejabat pemerintah atau para administrator hanya melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh kaum elite.

3. Model Kelompok

David B Truman (1951) menyatakan bahwa intraksi kelompok merupakan kenyataan politik. Individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan secara formal ataupun informal dalam kelompok kepentingan.

Menurut teori kelompok, kebijakan publik merupakan perimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut, tugas/peran sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok tersebut.

4. Model Sistem Politik

Model ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori sistem David Easton. Model ini didasarkan pada konsep teori informasi dan memandang kebijakan publik sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Jones pernah mengingatkan dalam bukunya *pengantar kebijakan publik* (1996) bahwa untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang komprehensif ada beberapa hal yang perlu dicermati, sebagai berikut (Agustino, 2017, hal. 100) :

1. Jumlah masalah yang ditangani. Apakah usulan kebijakan akan menyelesaikan seluruh masalah dalam suatu lingkup masalah? Ataukah perhatiannya hanya ditunjukkan pada kasus tertentu saja?
2. Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah? Apakah hanya melayani aspek-aspek tertentu?
3. Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang di formulasi sudah diuji semua dampaknya? Apakah pengujian di

batasi pada dampak langsung dalam suatu lingkup isu tertentu saja?

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster *to Implement* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu) (Anggara, 2018, hal. 232). Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2007, hal. 143).

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Anggara, 2018, hal. 232).

Sedangkan menurut Ripley dan Franklin implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintahan (Winarno, 2007, hal. 145).

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang dilukiskan. Model yang mereka tawar mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan (Winarno, 2007, hal. 146).

Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut ;

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur Birokrasi. Struktur birokrasi di artikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian besar selama dasawarsa yang lalu.

6. Kecenderungan Pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting.

c. Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan (Winarno, 2007, hal. 226).

Evaluasi adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan dari kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat seorang mengamati dan meneliti suatu fenomena (Jones, 1996, hal. 355).

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dalam suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Hayat, 2018, hal. 35).

William N Dunn mengungkapkan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Sedangkan Widodo yang mengutip pendapat Jones menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objektif, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya (Hayat, 2018, hal. 35).

Langbein, dalam analisis kebijakan publik (2007), membedakan tipe evaluasi menjadi dua macam, yaitu (Hayat, 2018, hal. 40) :

1. Tipe Evaluasi Hasil

Yang merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.

2. Tipe Evaluasi Proses

Yang merupakan riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*.

Cara ilmiah berarti, kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti, kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti, cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2017, hal. 2).

Metode di dalam penelitian ini, tentu ialah sebagai cara untuk menjawab masalah yang ada dengan menggunakan teori sebagai alat. Metode juga bersifat ilmiah yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, “Deskriptif” dianggap lebih cocok digunakan, yakni menjelaskan, menggambarkan, dan memberikan informasi dari hasil penelitian tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan

dan menguji kebenaran masalah yang akan dikaji.

1. Pendekatan/ Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Pengumpulan data penelitian kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi, jadi dalam penelitian mengenai kebijakan politik pemerintahan dalam perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di kota Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Adapun pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2017, hal. 9). Ada lagi pengertian dari metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, 2018, hal. 101).

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Tahap ini merupakan bagian penting dalam penelitian, yakni sebagai sudut pandang untuk memperoleh data dan memperkuat hasil penelitian, antara lain:

a. Sumber data Primer

Data Primer, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2017, hal. 130). Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pengamatan yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung kepada pihak Politisi di Kota Palembang, serta dengan mengumpulkan arsip dokumen terkait.

b. Sumber data Sekunder

Data Sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2017, hal. 131). Data ini hanya untuk memperkuat dari data primer. Dan data ini juga setidaknya ada untuk memperkuat data-data yang didapat langsung. Data-data sekunder ini bisa diperoleh dari media massa, Internet, Televisi, Jurnal, berkas dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Purposive Sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2018, hal. 96).

a. Pengumpulan data Primer

Keaslian data akan lebih valid ketika disajikannya data utama yang akurat sesuai dengan penelitian. Data utama tersebut dapat kita dapatkan dengan beberapa cara, antara lain:

1) Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. "a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic". Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2017, hal. 160).

Data atau informasi dalam tahap wawancara sangatlah penting, terlebih penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif, sehingga peneliti telah membuat beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait permasalahan yang ada. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini ialah (1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Bapak Zainal Abidin, SH; (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Bapak Muhammad Ridwa, SH; 3) Politisi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bapak Hagmar Bandaman.; (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bapak Mustafa Kama, SS., dan; (5) Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatra Selatan, Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag.

Peneliti juga telah menyiapkan diri untuk dapat mengumpulkan hasil wawancara yang dilakukan, ialah dengan melatih komunikasi agar lebih profesional dalam melaksanakan penelitian, tidak bersifat memaksa, menyesuaikan situasi dan kondisi, serta berpedoman pada cara wawancara penelitian.

3) Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, 2018, hal. 106).

b. Pengumpulan data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dengan teknik, sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Sitem pengumpulan data dengan memilah dokumen, catatan, arsip, dan gambar perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, jurnal, hasil penelitian, artikel, berita-berita melalui internet, dan juga paparan materi seminar atau webinar sesuai dengan materi yang akan diteliti.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan memahami literatur seperti, buku cetak yang mendukung permasalahan penelitian, artikel yang berasal dari sumber yang jelas, dan kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk menjadi bahan tambahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

a. Data Collection

Yang pertama, adalah data Collection (Pengumpulan data). Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak (Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, 2018, hal. 134).

b. Data Reduction

Yang kedua, adalah Data Reduction (Reduksi data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, 2018, hal. 134).

c. Data Display

Yang ketiga, adalah data display (penyajian data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya.

Dengan mendisplay data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, 2018, hal. 137).

d. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Penyajian data dilakukan akan menghasilkan sebuah titik inti dari sebuah penelitian, meskipun sifatnya masih belum valid atau tidak dapat dipastikan, namun adanya suatu kesimpulan pada bagian awal penelitian akan mempermudah melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti.

Dari keempat diatas peneliti yang akan kerjakan pertama untuk menganalisis data adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian mereduksikannya agar data bisa di rangkum dan agar peneliti bisa mengetahui apa saja data yang kurang, kemudia langkah terakhir peneliti mendisplay data tersebut.

H. Sistematis Penulisan Laporan

Adapun laporan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis skripsi dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian awal yang menjelaskan secara singkat namun terperinci mengenai mengapa penelitian perlu mengkaji permasalahan mengenai Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi di Kota Palembang, dalam penelitian ini terdiri atas adanya latar belakang, kemudian masalah telah dirumuskan untuk diteliti, tujuan yang jelas, manfaat yang berkelanjutan atau memiliki dampak setelah dilakukan penelitian, meninjau kajian literatur pada peneliti sebelumnya, terdapat alat analisis berupa teori, metodologi yang sudah di rancang untuk proses penelitian, dan telah mendesain bentuk sistematika suatu penulisan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Peneliti akan membicarakan khusus tentang berbagai materi yang berkaitan dengan apa yang akan di teliti oleh peneliti. Peneliti juga akan membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan apa yang di teliti oleh peneliti. Agar bisa memberikan gambaran bagi sang pembaca bahwa penelitian yang akan di teliti luas refrensinya.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini dilakukan di Kota Palembang, pada bab ini peneliti mebuat gambaran umum tentang profil kota Palembang dan pemerintahan Kota Palembang. Baik itu berupa sejarah kota Palembang, Geografi kota Palembang dan secara lengkap yang berkaitan dengan kota Palembang.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengambarkan tentang bagaimana rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya bisa terealisasi dengan baik, dan bagaimana juga pemindahan ibu kota itu dari perspektif Hankam, Politik, dan Ekonomi.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah point-point yang sangat penting dari penelitian tentang pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dari Jakarta ke Palngkaraya Kalmantan Tengah, sedangkan saran adalah berisi masukan yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Konsep Formulasi

Pembuatan keputusan/kebijakan (*decision making*) berada di antara perumusan kebijakan (formulasi) dan implementasi kebijakan, tetapi kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kebijakan Publik mempunyai kerangka pikir yang sistematis, terukur dan terarah (Hayat, 2018, hal. 96).

Setiap kebijakan yang diambil mempunyai konsekuensi logis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya dan menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul. Setiap kebijakan harus dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepentingan kepada masyarakat (Hayat, 2018, hal. 96).

Hal penting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan (*policy formulation*). Tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik (Anggara, 2018, hal. 181).

Formulasi adalah turunan dari formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijaksanaan pengembangan fase atau aktivitas (Jones, 1996, hal. 139).

Formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya. Dalam kaidah formulasi kebijakan, ada perencanaan formulasi yang harus dilakukan. Perencanaan formulasi merupakan perencanaan terhadap tahapan formulasi. Merencanakan perencanaan itu menjadi penting dalam menghasilkan sebuah konsep formulasi yang dapat dirumuskan dan diputuskan dalam kebijakan publik (Hayat, 2018, hal. 97).

Merencanakan Formulasi adalah untuk mengetahui apa saja yang akan direncanakan, hasil dari perencanaan akan dibawa kemana, dampak dan implikasi dari perencanaan yang dihasilkan akan melahirkan apa, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai perbandingan sebelum perencanaan itu direncanakan.

Perencanaan formulasi membutuhkan pelaksanaan formulasi untuk sebuah hasil formulasi yang sesuai dengan harapan. Pelaksanaan formulasi adalah melaksanakan apa yang direncanakan yang dimasukkan kedalam agenda setting proses kebijakan publik. Melaksanakan apa yang sudah dirumuskan dalam perencanaan formulasi adalah menjalankan proses formulasinya. Artinya bahwa, formulasi yang sudah direncanakan diimplementasikan dalam penentuan formulanya. Setelah itu baru dilakukan evaluasi terhadap pemilihan formulasi yang sudah ditetapkan dan dijalankan dalam implementasi formulasi (Hayat, 2018, hal. 97)

Para ahli mengemukakan formulasi sebagai berikut. Menurut Woll dalam Tangkilisan Formulasi kebijakan adalah pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu pada tahap para analisis kebijakan

publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain (Anggara, 2018, hal. 184).

Menurut Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai, termasuk pembuatan keputusan (Anggara, 2018, hal. 183).

Pelaksanaan formulasi kebijakan membutuhkan teknik dan cara yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dalam penentuan formulasinya dapat dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Makmur dan Rohana Thahier ada beberapa cara dan metode yang dapat digunakan dalam melakukan formulasi kebijakan yaitu (Hayat, 2018, hal. 98) ;

1. Penafsiran Fenomena

Kebijakan publik sejatinya adalah untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Solusi itu dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang baik, dilakukan berdasarkan formulasi yang baik pula yang diikuti oleh prinsip-prinsip keadilan dan komprehensifitas perencanaannya.

2. Penyusunan agenda kegiatan

Dalam penyusunan formulasi kebijakan membutuhkan konsepsi dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tindakan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyusunan formulasi tersebut dapat dimulai dari penyusunan agenda kegiatan yang merupakan program yang akan dikerjakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

3. Perumusan masalah

Setelah dilakukan agenda penyusunan agenda kegiatan, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan. Ada pula yang menyatakan bahwa masalah itu problem yang setiap individu atau kelompok pasti mengalaminya. Merumuskan masalah adalah aktivitas mengurai masalah apa yang menjadi objek kebijakan.

4. Identifikasi masalah

Perumusan masalah harus diikuti oleh identifikasi masalah atau menfokuskan persoalan yang ada, sehingga penyelesaian dapat diurai secara sistematis, terukur, terarah dan tepat sasaran. Setelah rumusan masalah diketahui, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi terhadap setiap masalah itu.

5. Pemecahan masalah

Pemecahan masalah terhadap persoalan yang menjadi rumusan masalah dalam formulasi kebijakan adalah kunci pelaksanaan kebijakan publik yang baik

6. Teknik pertimbangan keputusan

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan semua unsur yang terlibat dalam penetapan formulasi kebijakan. Indikator-indikator apa saja yang menjadi rujukan dalam penetapan keputusan harus ditentukan sebelum keputusan diambil.

7. Penyusunan konsep kebijakan publik

Pada penyusunan konsep kebijakan publik dibutuhkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh perumus kebijakan. Selain itu, kemahiran dalam menuangkan ide dan gagasan kebijakan menentukan pula terhadap konsep kebijakan yang akan dilaksanakan.

8. sosialisasi konsep kebijakan publik

Melakukan penyusunan konsep kebijakan publik dibuktikan dengan dokumen kebijakan yang menjadi pedoman dan panduan dalam pengambilan kebijakan publik. Konsep dalam bentuk dokumen perlu disosialisasikan kepada seluruh sasaran kebijakan. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan publik.

9. Pelegalisasian kebijakan publik

Setelah dilakukan sosialisasi terhadap konsep kebijakan publik dan selesai proses perbaikan sudah dilakukan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dilegalisasikan. Pelegalisasian konsep kebijakan publik menjadi jenis kebijakan publik dijadikan sebagai pedoman bagi semua stakeholder untuk menjalankan kebijakan publik tersebut secara baik dan benar.

Menurut Nicholas Henry (1975) mengelompokkan dua tipologi dalam analisis model kebijakan, yaitu kebijakan publik dianalisis dari sudut proses dan kebijakan publik dianalisis dari sudut hasil dan akibatnya. Model yang termasuk dalam kelompok penganalisisan dari sudut proses antara lain sebagai berikut (Anggara, 2018, hal. 185)

1. Model Institusional

Model ini merupakan model yang tradisional dalam proses pembuatan kebijakan publik. Fokus atau pusat perhatian model ini terletak pada struktur organisasi pemerintahan karena kegiatan politik berpusat pada lembaga pemerintahan.

2. Model Elite Massa

Menurut Nicholas Henry model ini memandang administrator pemerintahan tidak tampil sebagai pelayan rakyat tetapi bertindak sebagai penguasa. Dalam model ini, kekuasaan pemerintah berada di tangan kaum elite. Kaum elite menentukan kebijakan publik, sedangkan pejabat pemerintah atau para administrator hanya melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh kaum elite.

3. Model Kelompok

David B Truman (1951) menyatakan bahwa intraksi kelompok merupakan kenyataan politik. Individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan secara formal ataupun informal dalam kelompok kepentingan.

Menurut teori kelompok, kebijakan publik merupakan perimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut, tugas/peran sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok tersebut.

4. Model Sistem Politik

Model ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori sistem David Easton. Model ini didasarkan pada konsep teori informasi dan memandang kebijakan publik sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya.

C. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster *to Implement* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu) (Anggara, 2018, hal. 232). Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2007, hal. 143).

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Anggara, 2018, hal. 232).

Sedangkan menurut Ripley dan Franklin implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintahan (Winarno, 2007, hal. 145).

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang dilukiskan. Model yang mereka tawar mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan (Winarno, 2007, hal. 146).

Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut ;

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur Birokrasi. Struktur birokrasi di artikan sebagai

karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian besar selama dasawarsa yang lalu.

6. Kecenderungan Pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting.

D. Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan (Winarno, 2007, hal. 226).

Evaluasi adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan dari kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat seorang mengamati dan meneliti suatu fenomena (Jones, 1996, hal. 355).

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dalam suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Hayat, 2018, hal. 35).

William N Dunn mengungkapkan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Sedangkan Widodo yang mengutip pendapat Jones menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objektif, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya (Hayat, 2018, hal. 35).

Langbein, dalam analisis kebijakan publik (2007), membedakan tipe evaluasi menjadi dua macam, yaitu (Hayat, 2018, hal. 40) :

1. Tipe Evaluasi Hasil

Yang merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.

2. Tipe Evaluasi Proses

Yang merupakan riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan.

E. Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Terkait Jakarta sebagai ibu kota, Fahri Bachmid menjelaskan perjalanannya dalam konteks ketatanegaraan. Secara historis, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961.

Dalam konsideransnya, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin,

Landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Pada bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1964 tertera bahwa penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta merupakan kota pencetus Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia.

Pada tahun 1990, Presiden Soeharto mencabut kedua UU tersebut dengan mengundang UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Dalam konsiderans disebutkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.

Kemudian saat reformasi tahun 1998, Presiden Habibie mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, UU ini mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai Ibu Kota Negara.

Demikian pula ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2019 menjadi tahun yang mengejutkan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, di tahun 2019 pemerintah mengumumkan ibu kota Jakarta akan dipindahkan ke tempat lain. Sebenarnya wacana pindah ibu kota bukanlah hal baru. Wacana pemindahan ibu kota tercetus saat Presiden pertama Indonesia, Soekarno berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957 (detikfinace, 2019).

Presiden Joko Widodo resmi memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dan Joko Widodo menyebutkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Katanegara Provinsi Kalimantan Timur (detikfinace, 2019).

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. “Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir” Ujar Joko Widodo (Kompas.com, 2019).

Anggaran untuk pemindahan ibu kota baru Negara Indonesia kurang lebih sekitar 466 Triliun. Anggaran ini akan terbagi dari anggaran pendapatan dan belanja negara, swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha. Melalui APBN porsi nya 19,2% atau Rp. 89,472 Triliun sedangkan Swasta 26,2% atau sebesar Rp. 122,092 Triliun dan melalui KPBU porsi nya 54,6% atau sebesar Rp. 254,436 Triliun (CNBC Indonesia, 2019).

Pada tanggal 16 Agustus 2019 presiden Joko Widodo menyampaikan secara resmi pemindahan ibu kota pada saat sidang bersama DPD dan DPR di kompleks Palemen, senayan Jakarta. Sepuluh hari kemudian Jokowi melayangkan surat kepada ketua DPR saat itu, Bambang Soesatyo. Pemerintah pun berencana merancang undang-undang agar rencana pemindahan tersebut memiliki payung hukum yang legal (Kompas.com, 2020).

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah telah memasukan rancangan undang-undang RUU ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2021. Dari 38 RUU, 26 RUU diusulkan oleh DPR, 10 RUU diusulkan oleh Presiden dan 2 RUU diusulkan oleh DPD (Bisnis.com, 2020).

Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru Negara Indonesia menggantikan Jakarta antara lain karna beban berat yang sudah diterima oleh

ibu kota terdahulu yakni Jakarta. Masalah-masalah yang terjadi di Jakarta membuat Jakarta tidak layak lagi menjadi ibu kota.

G. Ibu Kota

Ibu kota negara atau *capital city* atau *political capital*, berasal dari bahasa Latin *caput* yang berarti kepala (*head*), dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan (Hutasoit, 2018, hal. 110). Dalam arti lain ibu kota adalah kepala dari provinsi-provinsi yang ada di suatu negara dan menjadi pusat negara dan pusat pemerintahan.

Ibu kota mempunyai fungsi strategis, ibukota selalu menjadi target utama dalam peperangan, karena dengan menguasai ibu kota biasanya menjadi jaminan menguasai sebagian besar musuh atau penentang, paling tidak memerosotkan moral untuk mengalahkan musuh (Sutikno, 2007).

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Kota Palembang

1. Sejarah Kota Palembang

Palembang merupakan salah satu kawasan di wilayah Nusantara yang secara historis memainkan peranan yang sangat penting. Kawasan ini memperlihatkan perkembangan sejarah yang sangat panjang dan menjadi tempat munculnya salah satu pusat peradaban besar dan tua di Nusantara (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

Sebelum terbentuknya kesultanan Palembang Darussalam, di kawasan ini telah muncul kerajaan besar yang mempengaruhi jalannya sejarah di kawasan Asia Tenggara, yakni kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Suwarnabhumi. Kedua kerajaan ini bukan hanya memainkan peran penting dalam sejarah politik di kawasan ini, melainkan juga dalam bidang pelayaran dan perdagangan yang melibatkan kaum dagang dari berbagai bangsa (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

a. Kerajaan Sriwijaya

Pada masa kejayaan yang berlangsung pada abad ke-7 hingga abad ke-9, kerajaan Sriwijaya digambarkan sebagai salah satu kerajaan maritim terpenting di kawasan Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar dan makmur. Kebesaran dan kemakmuran kerajaan Sriwijaya tergambar jelas dalam kesaksian seorang penulis Arab, Ibnu Rustah, yang menyatakan : “tidak ada negara yang sekaya dan lebih berkuasa serta mendapat upeti dari mana-mana selain Sriwijaya” (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

Di bidang ekonomi, peranan Palembang pada masa kerajaan Sriwijaya adalah sebagai pemegang kendali jalur perdagangan maritim yang membentang antara Timur Tengah, Afrika bagian Timur, dan India hingga China. Tidak berlebihan bila Palembang pernah digambarkan sebagai penguasa jaringan lalu lintas kapal-kapal “antar Asia” (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

b. Kerajaan Suwarnabhumi

Sriwijaya sebagai pusat kekuasaan yang merdeka diperkirakan berakhir pada tahun 775, pada tahun ini kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan Wangsa Syailendra dari Jawa. Palembang atau Sriwijaya adalah negara bawahan Swarnabhumi, yang didirikan oleh balaputradewa setelah tersingkir dari Jawa

menyusul kekalahannya dalam perang melawan Rakai Pikatan (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

Berdasarkan sumber sejarah china yang ditulis Chou Ku-fei, kerajaan Swarnabhumi mempunyai 15 negara bawahan. Palembang adalah salah satunya, sedangkan negara-negara bawahan lainnya antara lain adalah Pahang, Trengganu, Langkasuka, Kelantan, Kuala Brang, Cerating, Paka, Tambralingga, Grahi, Sunda, Muara Kampe, Lamuri, dan Srilangka (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

2. Awal mula Kesultanan Palembang

Runtuhnya kerajaan Sriwijaya menempatkan wilayah Palembang dalam bayangan-bayangan ancaman pusat-pusat kekuasaan politik lain yang disekitarnya yang lebih kuat. Selama beberapa abad pusat-pusat kekuasaan politik di Jawa secara bergantian berusaha menempatkan Palembang sebagai wilayah bawahannya (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

Sejak kejatuhan Sriwijaya sekitar tahun 1178 M, kemudian Palembang menjadi wilayah kekuasaan Majapahit dan adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang saat itu adalah Ario Damar yang dikenal masyarakat Palembang dengan sebutan Ario Dillah. Ario Dillah adalah putra dari raja kerajaan Majapahit prabu Brawijaya Sri Kertawijaya (Pulungan, 2018).

Sesudah runtuhnya kerajaan Majapahit maka Palembang menjadi daerah protektorat dari kerajaan Demak pajang dan kemudian dari kerajaan Mataram selama 71 tahun. Penguasa kerajaan Demak di Palembang yang pertama adalah Pangeran Seda Ing Lautan ini keturunan dari Raden Fatah (Pulungan, 2018).

Raden Fatah adalah anak dari Prabu Brawijaya dari kerajaan Majapahit dari seorang wanita Cina Muslim, yang ketika hamil diserahkan kepada adipati Palembang Ario Damar. Setelah anak itu lahir, ia di besarkan di Palembang dan di didik secara islam oleh Raden Kusen (anak kandung Ario Damar). Raden Fatah yang kemudian dipersilahkan pergi ke Jawa, ke Kraton Majapahit menyusul ayahandanya (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

Dengan kehadiran VOC di Palembang. Sejak tahun 1655 VOC telah menempatkan perwakilan dagang di Palembang dengan menunjuk Anthonij Boeij. Tindakan-tindakan Boeij khususnya penahanan Jung Cina dan perampasan lada yang di muat, serta pembakaran kapal di pulau kembaro telah menyulut amarah Pangeran Seda Ing Rejek (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

Penguasa Kesultanan Palembang dan pasukannya berusaha keras melakukan perlawanan. Pertahanan di tambah dengan membuat benteng dari tanah di tepi sungai Musi dan hilir pulau kembaro, untuk memperkuat benteng yang sudah ada, yakni benteng Bamagangan, benteng Martapura, dan benteng Menapura (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

Palembang menjadi ibu kota kesultanan Palembang Darussalam dari tahun 1533 hingga 1814. Masa kejayaan kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa kejayaan ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan Pantai Utara Jawa (Nawiyanto; Endrayadi, 2016).

3. Penetapan Kota Palembang

Kota Palembang adalah salah satu kota terbesar yang terdapat di daerah Sumatra Selatan dan juga Palembang tergolong kota-kota tertua di Indonesia yang cukup panjang sejarahnya (Abdullah M; dkk, 1984). Saat ini Kota Palembang adalah kota tertua yang ada di Indonesia dengan berumur 1382 jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal dengan Prasasti Kedukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan di daerah yang sekarang dikenal dengan kota Palembang (www.palembang.go.id, 2019).

Menurut Tepografinya, kota Palembang dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini sebagai kota Palembang dalam bahasa melayu *Pa* atau *Pe* sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan *lembang* atau *lembeng* artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu). Sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, *lembang* atau *lembeng* adalah genangan air. Jadi arti nama Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air (www.palembang.go.id, 2019).

Kondisi alam ini bagi nenek moyang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota Palembang yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah :

1. Tanah tinggi Sumatra bagian Barat, yaitu : Pegunungan bukit barisan.
2. Daerah kaki bukit atau *piedmont* dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
3. Daerah pesisir timur laut.

Ketiga satuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan kondisi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat

menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatra Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibu kota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia tenggara. Kejayaan Sriwijaya di ambil oleh kesultanan Palembang Darussalam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani di kawasan Nusantara (www.palembang.go.id, 2019).

4. Letak Geografis Kota Palembang

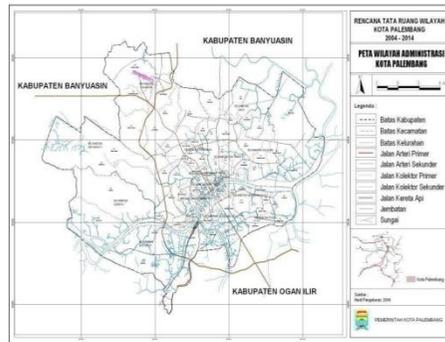
Kota Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatra Selatan dan sekaligus kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatra Selatan. Secara administratif kota Palembang berbatasan dengan (BPS kota Palembang, 2020);

- a. Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b. Batas Selatan : Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir
- c. Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d. Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

Kota Palembang terletak 2°52' sampai 3°5' lintang selatan dan 104°37'sampai 104°52' bujur timur. Pada tahun 2007 kota Palembang di bagi hanya 16 kecamatan dan 107 kelurahan, dan pada tahun 2018 berdasarkan SK Nomor 134/4123/BAK, terbentuk kecamatan jakabaring yang merupakan pemekaran dari kecamatan sebrang ulu 1 dan kecamatan ilir timur 3 yang merupakan pemekaran dari ilir timur 2. Sehingga saat ini wilayah administrasi kota Palembang di bagi menjadi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² / 40,061 ha, di mana kecamatan gandum memiliki luas terbesar di antara kecamatan lainnya, dan kecamatan ilir barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (BPS kota Palembang, 2020).

Gambar 3.1
Peta Administratif Kota Palembang



Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2020

Tabel 3.1
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Ilir Barat II	7
2.	Gandus	5
3.	Sebrang Ulu I	5
4.	Kertapati	6
5.	Jakabaring	5
6.	Sebrang Ulu II	7
7.	Plaju	7
8.	Ilir Barat I	6
9.	Bukitkecil	6
10.	Ilir Timur I	11
11.	Kemuning	6
12.	Ilir Timur II	6
13.	Kalidoni	5
14.	Ilir Timur III	6
15.	Sako	4
16.	Sematang Borang	4
17.	Sukarami	7
18.	Alang-alang Lebar	4

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2020

Tabel 3.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Presentase
1.	Iilir Barat II	6,22	1,55
2.	Gandus	68,78	17,17
3.	Sebrang Ulu I	8,28	2,07
4.	Kertapati	42,56	10,62
5.	Jakabaring	9,16	2,29
6.	Sebrang Ulu II	10,69	2,67
7.	Plaju	15,17	3,79
8.	Iilir Barat I	19,77	4,93
9.	Bukitkecil	9,92	2,48
10.	Iilir Timur I	6,50	1,62
11.	Kemuning	9,00	2,25
12.	Iilir Timur II	10,82	2,70
13.	Kalidoni	27,92	6,97
14.	Iilir Timur III	14,76	3,68
15.	Sako	18,04	4,50
16.	SematangBorang	36,98	9,23
17.	Sukarami	51,48	12,5
18.	Alangalang Lebar	34,58	8,63

Sumber : BPS Kota Palembang dalam angka 2020

Tabel 3.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2019

NO	Nama Kecamatan	Tinggi Wilayah (m a.s.l)	Jarak ke Ibukota (km2)
1.	Iilir Barat II	9	2,50
2.	Gandus	11	11,00
3.	Sebrang Ulu I	7	4,50
4.	Kertapati	6	14,00
5.	Jakabaring	4	8,90
6.	Sebrang Ulu II	7	5,10
7.	Plaju	9	8,30
8.	Iilir Barat I	14	4,40
9.	Bukikecil	8	2,10
10.	Iilir Timur I	9	3,90
11.	Kemuning	13	6,90
12.	Iilir Timur II	14	4,80

13.	Kalidoni	8	7,00
14.	Iilir Timur III	14	6,10
15.	Sako	9	9,50
16.	Sematangborang	7	9,50
17.	Sukarami	15	11,00
18.	Alang-alang Lebar	12	13,00

Sumber : BPS kota Palembang dalam angka 2020

5. Keadaan Tipografi

Wilayah sebrang ulu pada umumnya mempunyai Topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi ($\pm 3,75$ m di atas permukaan laut), kecuali lahan-lahan yang telah dibangun dan akan dibangun dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan dan reklamasi. Di bagian wilayah sebrang ilir ditemui adanya variasi tepografi ketinggian 4 m sampai 20 m di atas permukaan laut (Buku Putih Kota Palembang).

Dengan demikian dari aspek tepografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kemiringan atau kelerengan yang besar. Sebagian besar dari wilayah kota Palembang merupakan dataran rendah yang di landai dengan ketinggian tanah rata-rata + 12 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah yang bergelombang ditemukan di beberapa tempat seperti kenten, bukit sangkal, bukit siguntang, dan talang buluh Gandus. Adanya perbedaan karakter topografi di kota Palembang (kawasan seberang ulu dan seberang ilir) terkait dengan kondisi hidrologi, berupa keadaan anak-anak sungai dalam wilayah (Buku Putih Kota Palembang).

6. Keadaan Demografi

Penduduk Palembang merupakan etnis melayu dan menggunakan bahasa melayu yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai bahasa Palembang. Namun para pendatang sering kali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Komerling, Rawas, Musi, Pasemah, dan Semendo. Pendatang dari luar Sumatra Selatan kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota Palembang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang), 2019)

Namun untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan. Seperti dari Jawa, Minangkabau, Madura, Bugis, dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab, dan India ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota Palembang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang), 2019).

Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti kampung kapitan yang merupakan wilayah komunitas Tionghoa serta kampung al munawwar, kampung assegaf, kampung al-habsyi, kuto batu, 19 ilir kampung jamalullail dan kampung alawiyin sungai bayas 10 ilir yang merupakan wilayah komunitas arab ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota Palembang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang), 2019).

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Iilir Barat II	73.269
2.	Gandus	65.782
3.	Sebrang ulu I	94.122
4.	Kertapati	92.084
5.	Jakabaring	93.271
6.	Sebrang Ulu II	107.101
7.	Plaju	90.734
8.	Iilir Barat I	141.544
9.	Bukit kecil	50.301
10.	Iilir Timur I	79.26
11.	Kemuning	93.977
12.	Iilir Timur II	95.963
13.	Kalidoni	112.932
14.	Iilir Timur III	85.971
15.	Sako	93.326
16.	Sematang Borang	36.445
17.	Sukarami	158.246
18.	Alang-alang Lebar	98.537
Jumlah Penduduk tahun 2019		1.662.893

Sumber : BPS kota Palembang dalam angka 2020

7. Keadaan Ekonomi Kota Palembang

Perkembangan ekonomi kota Palembang sebagai ibukota dari Provinsi Sumatra Selatan dalam beberapa dekade mengalami kemajuan baik dalam perkembangan wilayah maupun kotanya. Kemajuan kota Palembang dilihat dari beberapa sektor perkembangan ekonomi yaitu sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, dan beberapa sektor perkembangan lainnya. Kemajuan dari beberapa sektor ini memerlukan suatu proses perencanaan yang memakan waktu tidak sedikit.

Proses perencanaan tersebut di tunjang oleh beberapa potensi yang dimiliki oleh kota Palembang. Kota Palembang memiliki potensi antara lain kekayaan sumber daya alam mineral, sumber daya hutan, sumber daya

lahan, sumber daya manusia, wisata sejarah, kebudayaan, kuliner, dan perhotelan. Perpaduan berbagai budaya, sejarah dan kultur masyarakat Palembang membuat kota ini memiliki banyak julukan seperti kota pempek yang merujuk kepada makanan khas kota Palembang.

Potensi wisata yang dimiliki kota Palembang membuat daya tarik pengunjung untuk berwisata di kota Palembang. Berikut potensi wisata yang dimiliki oleh kota Palembang antara lain, Benteng kuto besak, Bukit siguntang, Sungai Musi, Pulau Kemarau dll, dan juga keanekaragaman kulinernya seperti Pempek yang banyak diminati oleh pengunjung yang mengunjungi kota Palembang.

Sekarang ini kota Palembang semakin ramai sebagai tujuan wisata dan event olahraga nasional maupun Internasional sejak tahun 2004. Agenda besar kompetisi olahraga dimulai dengan Pekan Olahraga Nasional (PON), kemudian olahraga se asia tenggara (Sea Games) pada tahun 2011, Islamic Solidarity Games (ISG) pada tahun 2013, serta pekan olahraga terbesar di Benua Asia yaitu Asian Games pun diadakan di Kota Palembang pada tahun 2018. Dengan adanya pekan olahraga nasional maupun Internasional kota Palembang banyak yang mengunjunginya.

Melihat peluang dan kesempatan tersebut, sektor pariwisata kota Palembang semakin menarik untuk dikembangkan misalnya melalui kegiatan-kegiatan promo sentra usaha toko pempek di kota Palembang, pengenalan potensi dan produk unggulan kota Palembang baik yang dilakukan oleh dinas Pariwisata maupun kerjasama dengan masyarakat atau dengan penguasa setempat.

Produk-produk makanan olahan yang terkenal di Kota Palembang sebagai wisata kuliner kota Palembang adalah pempek, tekwan, model, laksan dan burgo. Di antara ke lima produk olahan pempek lah yang paling terkenal. Bisnis usaha pempek di kota Palembang cukup berkembang dan terus menunjukkan kemajuan yang di dukung oleh banyaknya toko pempek di kota Palembang.

Usaha memajukan sektor pariwisata Palembang bidang kuliner ini tidak mudah untuk dilakukan, terdapat tantangan dan hambatan dari sisi pengusaha dan pemerintahan daerah, misalnya perizinan, modal, promosi, dan jaminan kualitas mutu makanan./ banyaknya usaha pempek dari skala modal usaha kecil hingga besar membuat persebaran lokasi toko tidak menentu dan menimbulkan persaingan usaha yang sangat jelas sesama produsen pempek. Biasanya lokasi strategis di sepanjang jalan utama kota Palembang di dominasi oleh usaha toko Pempek ternama. Pelaku bisnis pempek ternama memilih lokasi penjualan di sekitar jalan utama dikarenakan kemajuan pembangunan fisik daerah seperti jalan, komplek perkantoran dan perhotelan.

8. Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut (BPS kota Palembang, 2020).

Pengeluaran penduduk dan konsumsi makanan. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Meskipun harga komoditas barang dan jasa antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi. Sehingga angka pengeluaran juga dapat dipakai untuk perbandingan antar wilayah/daerah (BPS kota Palembang, 2020).

Rata-rata per kapita penduduk pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 1.273.229 per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp. 569.582 dan non makanan sebesar Rp. 703.647 berdasarkan jenis pengeluarannya, pengeluaran per kapita makanan sebulan terbesar tahun 2019 digunakan untuk belanja kelompok makanan dan minuman jadi dan rokok dan tembakau yaitu sebesar Rp. 203.759 dan Rp. 66.133, sementara untuk pengeluaran per kapita non makanan sebulan terbesar digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga serta untuk keperluan aneka barang dan jasa, masing-masing sebesar Rp. 340.041 dan Rp. 187.647.

9. Kota Palembang sebagai Kota Wisata

Kota Palembang boleh dikatakan memiliki kekhasan tersendiri. Palembang adalah salah satu kota sungai, alangkah baiknya jika tradisi masyarakat Palembang yang terkait sungai musi dan anak sungainya digali kembali untuk kepentingan atraksi pariwisata. Palembang terdapat banyak sekali objek wisata yang menarik dan indah. Sebut saja misalnya sungai musi. Sungai yang membelah Provinsi Sumatra Selatan sepanjang 750 Km ini disebut sebagai sungai terpanjang dipulau Andalas. Sungai musi sarat nuansa sejarah. Sungai musi merupakan urat nadi perekonomian, sekaligus saksi hidup kejayaan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga 12 Masehi.

Saat ini pemerintahan kota Palembang fokus memberikan perhatian terhadap keberadaan sungai musi yang bermuara hingga ke selat bangka ini. Selain tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai arus lalu lintas pelayaran transportasi pengangkutan barang dan orang. Pemerintahan kota Palembang telah menjadikan sungai musi sebagai salah satu objek wisata unggulan. Keberadaan sungai musi sebagai objek wisata unggulan di tunjang dengan adanya jembatan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang begitu dikenal khalayak.

Jembatan yang merupakan warisan dari pemerintahan Presiden Soekarno dan telah berdiri 45 tahun silam merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang perlu dilestarikan. Kondisi yang strategis ini turut diperkuat dengan adanya peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya. Seperti Benteng Kuto Besak, Tuju Perjuangan Rakyat, Museum, serta Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera).

E. Politisi

Politisi adalah orang yang terlibat di dalam perpolitikan, dan juga biasanya termasuk kedalam ahli politik. Politisi juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan. Dalam sebuah negara, para politisi membentuk badan eksekutif dari sebuah pemerintah dan kantor sang penguasa di suatu negara. Serta bagian Legislatif, dan pemerintah di tingkat regional dan lokal (www.wikipedia.com).

A. Profil Hagmar Bandamana

1. Keterangan Umum

Nama : Hagmar Bandaman

TTL : Palembang, 5 Juni 1963

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengecara

Jabatan : Wakil ketua bidang organisasi PDI Perjuangan

Alamat : Jl. Mp. Mangkunegara, komplek kenten permai, blok H.2

kel. Bukitsangkal, Kec. Kalidoni Palembang

No Telp./Hp : 0812 7198 7773

Istri : 1

Anak : 2

2. Pendidikan Umum

- SD : Sd Negri 21 Tanjung Karang, Lampung
- SMP : Smp Persit Kartika Candra Lampung
- SMA : Sma Negri 1 Bandar Lampung
- S1 : Universitas Muhammadiyah

4. Riwayat Organisasi

- Peradi
- Wakil ketua bidang Organisasi PDI Perjuangan

Alasan penulis memilih Hagmar Bandaman adalah, Hagmar Bandaman seorang pejabat partai dan juga Hagmar Bandaman disalah satu partai yaitu partai PDI Perjuangan memiliki Jabatan yaitu Wakil ketua bidang Organisasi PDI Perjuangan

B. Biodata Mustafa Kamal

1. Profil Umum

Nama : H Mustafa Kamal

TTL : Jakarta, 14 Desember 1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPR RI Komisi 10

2. Riwayat Pendidikan

SD : SD Ria Persit KCK Jakarta

SMP : SMP Negri 20 Jakarta

SMA : SMA Negri 14 Jakarta

S1 : Universitas Indonesia

3. Riwayat Organisasi

- Deklarator Kammi
- Ketua Dept kepeloporan pemuda
- Pemuda DPP PKS
- Anggota MPP PKS
- Sekjend DPP PKS
- Wakil ketua bidang kebijakan publik DPP PKS

4. Riwayat Pekerjaan

- Staff pengajar Nurul Fikri
- Staff pimpinan dan dosen program extention FE UI
- Dosen perguruan al Hikmah
- Direktur retas leadership centre
- Anggota KPU
- Pimpinan redaksi jurnal politik akses
- Komisaris visi publishing
- Redaktur pelaksana majalah tarbawi
- Anggota badan legislasi
- Anggota mahkamah kehormatan DPR RI
- Anggota badan musyawarah DPR RI
- Anggota DPR RI

Mustafa Kamal adalah seorang politisi yang tidak diragukan lagi, Mustafa Kamal sudah beberapa priode menjadi anggota DPRD maupun DPR RI. Mustafa Kamal juga pernah menjadi anggota KPU. Oleh sebab itu penulis memilih Mustafa Kamal untuk menjadi Informan dari penelitian ini

C. Anggota DPRD Palembang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang (DPRD Kota Palembang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan menjadi mitra kerja pemerintahan kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan. Pada pemilihan umum legislatif 2019, DPRD kota Palembang menepatkan 50 orang wakil rakyat yang terpilih dari enam daerah pemilihan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang memiliki satu orang Ketua DPRD dan tiga orang Wakil ketua Dprd yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di pemilihan lembaga legislatif.

Tahun 2019 kemarin yang terpilih sebagai ketua adalah Zainal Abidin dari fraksi partai Demokrat dan ketiga wakilnya masing-masing wakil ketua satu Sri Wahyuni dari fraksi Gerindra, wakil ketua dua M Ali Syaban dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan wakil ketua tiga yaitu Azhari Harris dari fraksi Partai Amanat Nasional.

Dari kursi-kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang. Komposisinya adalah, Partai Demokrat memiliki kursi terbanyak dengan banyak kursi 9 kursi di tahun 2019, Partai Gerindra 8 kursi, PDI Perjuangan 7 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, Partai PPP 1 kursi.

1. Muhammad Ridwan



1. Profil Umum

Nama : Muhammad Ridwan

TTL : Palembang, 16 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Macan Kumbang 3 Komplek Kencana Hati 8 Blok A5

Pekerjaan : Anggota DPRD Palembang

Jabatan : Anggota Komisi 1 Dprd Palembang

No Hp : 0822 8068 3783

2. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 404 Palembang

SMP : SMP Negeri 27 Palembang

SMA : SMA Negeri 11 Palembang

S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

S2 : Magister Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

S3 : Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya (Lagi Proses)

3. Riwayat Organisasi

- Remaja Masjid Nurul Islam
- Pramuka SMA 11
- Pusat advokasi Hukum dan Ham (PAHAM) Indonesia
- Kabil Polhukam DPW PKS Sumsel 2005 sd 2010
- Seketaris DPD PKS Palembang 2010 sd 2015
- Ketua DPD PKS Palembang 2015 sd 2020
- Kabid hukum dan kebijakan publik DPW PKS Sumsel

Muhammad Ridwan atau sering dikenal dengan sebutan Kak Ridwan adalah salah satu Politisi yang ada di Kota Palembang, Muhammad Ridwan saat ini menduduki salah satu di antara 50 kursi DPRD Kota Palembang. Muhammad Ridwan juga sempat menjadi ketua DPD PKS Kota Palembang, oleh sebab itu penulis memilih Muhammad Ridwan untuk menjadi informan dari penelitian ini

2. Zainal Abidin



1. Profil Umum

Nama : Zainal Abidin, SH

TTL : Palembang, 1 September 1975 Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Palembang

Alamat Rumah : Jl. Nila Kandi rt.35 rw.02 kel. Karya Jaya Kec.

Kertapati Palembang

2. Riwayat Pendidikan

Sd : Sd Negri 1 Karya Jaya, Sd Negri 12 Keramasan

SMP : Smp Negri 25 Keramasan

SMA : STM negri 1 Palembang

S1 : Sakiya Kirti

Zainal Abidin adalah salah satu orang yang terpilih menjadi anggota DPRD bahkan Zainal Abidin menduduki kursi sebagai ketua DPRD Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan penelitian yang dilakukan kepada Politisi di kota Palembang yang membahas tentang Kebijakan Pemindahan ibu kota Negara Indonesia menurut politisi di kota Palembang. Untuk mendapatkan data-data primer yang di butuhkan maka peneliti melakukan wawancara dan observasi. Dalam penelitian tentang kebijakan perpindahan ibu kota Negara Indonesia, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (sugiyono, 2018, hal. 96). Berikut hasil penelitian yang disajikan peneliti mengenai Rencana Kebijakan pemindahan ibu kota Negara Indonesia menurut para ahli politik di kota Palembang.

A. Latar Belakang Rencana Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia

Sejak dahulu Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terkenal dengan sejarah perjuangannya, dari zaman Belanda yang sering dikenal dengan nama Batavia sampai negara Indonesia merdeka. Nilai-nilai historis yang cukup panjang dalam sejarah terbentuknya bangsa dan politik di Indonesia.

Antara lain historis yang dikenal dengan pembuatan teks proklamasi yang dilakukan di Jl Imam Bonjol, Jakarta pusat tepatnya di rumah Laksamana Mada. Historis lain juga Jakarta menjadi tempat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan di Jl. Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, dan juga historis rapat besar di Lapangan Ikada yang dihadiri 300 ribu orang (Monas).

Dengan adanya historis-historis yang terjadi di DKI Jakarta, seharusnya membuat Pemerintah pusat harus berpikir panjang atas Rencana Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden ke-1 Indonesia ini berkeinginan pada saat itu memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Presiden pertama Indonesia (Soekarno) memilih Palangkaraya, karna Palangkaraya (Kalimantan Tengah) terletak di tengah-tengahnya negara Indonesia. tetapi, rencana Presiden Soekarno tidak terealisasi untuk memindahkan Ibukota Negara Indonesia.

Pada tahun 2019, timbul kembali rencana perpindahan ibukota Indonesia yang akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Tetapi, pada tahun 2019 ini pada masa Presiden Joko Widodo berbeda dengan zaman Presiden pertama (Soekarno) yang ingin memindahkan ibukota ke Kalimantan Tengah, tetapi di

zaman Presiden Joko Widodo memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat ibukota baru Indonesia kedepannya. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih Kalimantan Timur sebagai ibukota baru di negara Indonesia yang baru. Keputusan ini dilakukan oleh Presiden pada tahun 2019 di Istana Negara. Latar belakang dari rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia ini antara lain masalah-masalah besar yang terjadi di ibukota lama (Jakarta) masih sering terjadi, dan juga ancaman-ancaman baru yang akan melanda ibukota Jakarta, oleh sebab itu Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia.

Mustafa Kamal, Selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan

“Latar belakang dari rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, antara lain : Kemacetan tinggi, kualitas udara yang tidak sehat, rawan banjir tahunan, tanah turun dan muka air laut naik, keterbatasan suplai air baku, potensi ancaman gempa di Jakarta” (Kamal, 2021)

Jadi dari perkataan yang dilontarkan oleh Musafa Kamal selaku anggota DPR RI latar belakang dari kebijakan pemindahan ibu kota ini adalah Banjir, Kemacetan, Udara yang tidak sehat, Tanah dibawah permukaan laut, Keterbatasan suplai air baku, dan potensi ancaman gempa yang akan terjadi di Jakarta.

1. Banjir DKI Jakarta



Banjir di ibukota Jakarta tidak bisa lagi dipungkiri, karna mungkin banjir ini sudah sangat akrab terdengar di DKI Jakarta, apalagi Jakarta terdapat banyak sungai-sungai aliran, membuat kota Jakarta sering sekali di munculkan masalah banjir. Bahkan dari zaman kolonial Belanda Jakarta sudah akrab dengan banjir.

Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa sejak pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Jakarta, Jakarta sudah akrab dengan banjir. Semula Januari 1619, Pieterszoon Coen mengajak Simon

Stevin merancang kota di muara sungai ciliwung yang kerap dilanda banjir seperti bentuk kota Amsterdam di Belanda (Harsoyo, 2013).

Banjir ini adalah salah satu penyebab latar belakangnya terjadi rencana kebijakan perpindahan ibukota. Untuk sekarang banjir ini bukan hanya masalah tingkat daerah tetapi juga termasuk masalah nasional.

Cakupan masalah banjir di Jakarta terus meningkat. meningkatnya banjir tidak hanya karena faktor alam, tetapi juga karna aktivitas penduduk yang banyak sekali membuang sampah sembarangan di tempat-tempat aliran sungai yang bisa berakibat banjir. Sekarang tanah di Jakarta sudah turun dari permukaan laut (Nugroho, 2002).

Di awal tahun 2020, ibu kota Jakarta mendapat kado istimewa, yaitu datangnya banjir yang melanda ibu kota di awal tahun. Hujan deras di Jakarta pada malam tahun baru menyebabkan banjir yang mengenai permukiman, jalan, bahkan bandara di Jakarta. Bahkan banjir pernah terjadi di istana kepresidenan.

Oleh karena itu salah satu latar belakang terjadinya kebijakan perpindahan ibu kota ini adalah masalah banjir yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi di ibu kota Jakarta.

2. Kemacetan Tinggi



Kemacetan salah satu masalah terbesar yang mayoritas terjadi di kota-kota besar, atau sering disebut metropolitan. Apalagi dengan bertambah jumlah populasi penduduk dan menambahnya angka kendaraan membuat kepadatan akan semakin bertambah.

Kemacetan lalu lintas akan memperlambat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, kemacetan lalu lintas juga akan membuat biaya angkutan barang dan jasa menjadi mahal, dan karena kemacetan lalu lintas, kendaraan tidak bisa sampai ke tujuan tepat waktu.

Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di ibukota sekarang (Jakarta) untuk mengatasi masalah kemacetan ini, salah satu kebijakan yang di ambil antara lain, dengan diberlakukannya sistem ganjil genap. dengan berdasarkan peraturan

pemerintahan no. 164 tahun 2016 yang mengatur tentang pembatasan lalu lintas untuk sistem ganjil dan genap.

Kemacetan ini adalah salah satu yang melatar belakangi rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia. karna dengan adanya kemacetan akan membuat terlambatnya perjalanan yang akan ditempuh oleh orang-orang penting negara.

3. Kualitas Udara yang Tidak Sehat



Resiko yang diambil oleh kota-kota besar yaitu bertambahnya populasi penduduk dan bertambahnya kendaraan yang akan menyebabkan kemacetan dan populasi udara. DKI Jakarta menempati peringkat ke-5 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di antara kota-kota besar di dunia (Kompas.com, 2020).

Tercesarnya udara di DKI Jakarta menjadi salah satu yang melatar belakangi rencana kebijakan pemindahan ibu kota yang di ambil oleh Presiden Joko Widodo. Menurut penulis juga ibu kota harus terjaga udaranya yang nyaman.

4. Keterbatasan Suplai Air Baku

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebutuhan air bersih di Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 846 juta meter kaki kubik per tahun. Sedangkan layanan air di PDAM Jakarta hanya mencapai sekitar 62 persen (Republika.co.id, 2019).

Walaupun kita ketahui Jakarta sering terjadi hujan dan banjir, tetapi krisis air baku ini sangat terjadi di Jakarta. Banyak warga Jakarta yang masih kekurangan air baku untuk kehidupan warga sehari-hari. 13 sungai yang ada di Jakarta tidak bisa memenuhi kebutuhan air baku untuk warga Jakarta.

Keterbatasan suplai air baku ini adalah salah satu yang melatar belakangi rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, karna air baku ini sangat penting, apalagi ibukota adalah tempatnya pejabat-pejabat pemerintah bahkan dunia.

5. Ancaman Gempa di Jakarta

Pada tahun 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan alasan ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta adalah karena potensi bencana seismik di pulau Jawa. Gempa besar sedang mengancam Jakarta, bahkan bukan hanya Jakarta tetapi juga seluruh pulau Jawa terancam Gempa. (CNN Indonesia, 2019).

Dengan adanya ancaman gempa dasyat yang mengancam pulau Jawa khususnya ibu kota, oleh sebab itu Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan pemindahan ibu kota, karna sebelum terlambat untuk memindahkan ibu kota.

Jadi berdasarkan penelitian yang peneliti teliti, yang melatar belakangi terjadinya rencana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berbagai masalah besar yang terjadi di Jakarta : Banjir, Macet. Kekurangan Air Baku, Udara yang tidak sehat, dan Potensi Ancaman Gempa Bumi yang akan melanda DKI Jakarta. Oleh sebab itu Presiden mengambil langkah cepat untuk memindahak ibu kota ke luar pulau Jawa ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Pandangan Politisi di Kota Palembang

Kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia (Presiden Joko Widodo) pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara membuat banyak polemik yang terjadi di kalangan ahli-ahli politik nasional maupun ahli-ahli politik di Kota Palembang dan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi berita yang sangat mengejutkan di tahun 2019 lalu.

Dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo membuat ahli-ahli politik nasional termasuk ahli politik di kota Palembang angkat bicara tentang persoalan kebijakan yang diambil tahun 2019 lalu. Banyak sekali ahli-ahli politik mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan Presiden Joko Widodo ini.

Pada kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang di putuskan oleh Presiden Indonesia (Joko Widodo) ini, masing-masing dari ahli politik kota Palembang yang penulis wawancarai mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kebijaka ini.

Prof. Dr. Romli Sa, M.ag, selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Selatan berpandangan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur belum perlu di lakukan. Karna Romli Sa melihat DKI Jakarta atau ibu kota sekarang masih bisa untuk menjadi ibu kota.

”setuju tidak setuju, untuk sementara sebenarnya tidak perlu untuk memindahkan ibu kota. Paling lama satu dekade (20 Tahun) kedepan belum perlu memindahkan ibu kota. Untuk 20 tahun kedepan kalau soal kepadatan DKI Jakarta bisa menampung itu” (Romli, 2021)

Pernyataan tentang kebijakan ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal (Selaku Anggota DPR RI) bahwa pandangannya mengenai kebijakan pemindahan ibu kota ini tidak tepat, karna pemindahan ibu kota ini berlari dari masalah ibu kota Jakarta, terlebih lagi wilayah yang dipilih menjadi ibu kota baru adalah Kalimantan Timur, yang memiliki fungsi konservasi dan perlindungan ekosistem.

”Tidak Tepat, karna setidaknya ada empat alasan utama pemerintah ingin memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta : Kemacetan tinggi dan kualitas udara yang tidak sehat, Rawan banjir tahunan, tanah turun dan muka air laut naik, keterbatasan suplai air baku, potensi ancaman gempa di DKI Jakarta. Apabila dicermati, ada kesan pemerintah menyerah dan lari dari masalah kronis di DKI Jakarta dan kebijakan ini tidak tepat, karena berangkat dari masalah ibu kota. Terlebih lagi, lokasi yang dipilih di Kalimantan Timur merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi dan perlindungan ekosistem.” (Kamal, 2021).

Berbeda halnya dengan Muhammad Ridwan salah satu pengamat politik dan juga beliau salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palembang. Muhammad Ridwan mengatakan pandangan pribadinya soal perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan. Beliau berpandangan ibu kota pindah di perlukan, tetapi harus di perhitungan dengan matang karna agar tidak ada lagi istilah Jawa sentries karna seluruh pusat ada di Jawa dan dengan adanya perpindahan ibu kota bisa membuat pemerataan pembangunan di Indonesia.

“kalau berbicara tentang nilai strategis, adanya pemindahan ibu kota, memang diperlukan, namun demikian harus dengan suatu pertimbangan yang sangat matang. Karna Indonesia ini negara kepulauan yang begitu besar, sehingga kita membutuhkan ibu kota yang lebih despersentatif untuk perimbangan pusat dan daerah. Sehingga tidak ada lagi istilah Jawa Sentries karna semuanya ada di pulau Jawa.Semuanya harus diselesaikan kepulauan seperti itu. Dan kita membayangkan yang akan datang, tidak ada lagi pemerintah yang centralistik. Dan juga semua wilayah di Indonesia ini mendapatkan tempat yang sama” (Kamal, 2021)

Mustafa Kamal juga berpandangan dengan adanya istilah perpindahan ibu kota Negara Indonesia ini adalah lari dari masalah yang ada di Ibu Kota sekarang DKI Jakarta seperti banjir, macet, kekurangan air bersih atau sebagainya. Itu bukanlah urgensi dari perpindahan ibu kota, karna berbagai

masalah tersebut terjadi bahkan sangat terjadi di kota-kota besar di dunia. Dan sudah banyak contoh kota-kota besar dunia bisa mengatasinya.

“kalau menurut saya, jangan dari situ urgensi perpindahan ibu kota. Meskipun secara pragmatis itu sah-sah saja. Sebab masalah tersebut itu kan karna miss manajemen dalam mebangun. Tinggal diperbaiki saja. Kita kan bisa menyelesaikan masalah banjir, masalah polusi udara, masalah kemacetan, masalah air bersih. Itu hanya dengan ilmu manajemen perkotaan saja dan tata kotanya saja di perbaiki. Jadi itu bukan masalah kota biasa. Itu adalah permasalahan kota besar di seluruh dunia dan sudah ada banyak contohnya yang berhasil keluar dari persoalan itu. Kita pun sudah nyicil, kemacetan sudah terulai, banjir teratasi, meskipun masih belum tuntas, polusi sekarang dengan pandemi ini sudah membaik. Jadi sebetulnya persoalan itu bukan menjadi alasan dari perpindahan ibu kota” (Kamal, 2021).

Hagmar Bandaman berpandangan Pemerintahan tidak berlari dari permasalahan Jakarta. Kita ketahui juga secara geografis Jakarta sudah berada di bawah laut. Jadi kita tidak bisa melawan alam untuk masalah kebanjiran ini. Kita juga ketahui bahwa Presiden itu mengurus Nasional Indonesia bukan hanya Jakarta lagi pula Jakarta memiliki Gubernurnya dan gubernurnya lebih paham dengan kondisi Jakarta.

“presiden mengurus nasional seluruh bukan Jakarta, Jakarta ada gubernurnya. Dalam Kondisi Geografis tanpa di pungkiri Jakarta sudah ada di bawah laut. Kita tak bisa pungkiri” (Bandaman, 2021).

Zainal abidin selaku ketua Dprd kota Palembang mengatakan pendapatnya soal perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Presiden Indonesia (Joko Widodo) sudah mengkaji lebih dalam dari perpindahan ini, karna suatu kebijakan itu harus di kaji terlebih dahulu. Apakah layak ibu kota di pindahkan. Oleh sebab itu presiden sudah bisa mengambil kebijakan perpindahan ibu kota ini.

“mungkin apa yang dilakukan oleh presiden sudah melihat kajian-kajian tentang perpindahan ibu kota. Menurut beliau ibu kota sudah layak di pindahkan. Kalau kita beranggapan kalau memang itu baik untuk kemasyarakatan kenapa tidak untuk meindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur” (Abidin, 2021).

Perpindahan ini juga melihat dari sisi geografi kota yang akan di jadikan tempat perpindahan (Kalimantan Timur). Dengan minimnya bencana Kalimantan Timur sangat baik untuk dijadikan sebagai ibu kota yang baru.

Apalagi ibu kota harus memiliki tempat yang aman dan tentram. Cita-cita presiden pertama pun menjadi patokan dari perpindahan ibu kota ini. Hagmar Bandaman selaku anggota partai PDI Perjuangan mengungkapkan sangat setuju dengan perpindahan ini.

“pandangan saya tentang perpindahan ibu kota itu memang sangat sudah mendesak, dan saya sangat setuju. Karna dari kondisi geografis disitu (Kalimantan Timur) minimnya bencana, kemudian memang faming father kita (Soekarno) sudah mengarahkan di sana. Yang ada dua nama kota raya di Indonesia ini hanya dua yaitu Jakarta Raya dan Palangkaraya. Hanya mungkin itu bergeser dari palangkaraya. Mungkin itu untuk melihat posisi strategis dari ibu kota yang akan datang”(Bandaman, 2021)

Ibu kota juga yang pindah pusat pemerintahannya saja, sedangkan pusat ekonomi tetap akan di Jakarta. Karna tanpa di pungkiri Jakarta sudah menjadi pusatnya ekonomi di Indonesia. Tetapi pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat pusat ekonomi ada di New York dan pusat pemerintahan ada di Washington DC.

“kita lihat kondisi saat ini Amerika Serikat, memang DKI Jakarta itu sudah layak menjadi kotanya pusat ekonomi, seperti Amerika pusat ekonomi di New York dan pusat pemerintahan di Washington DC. Dan nanti di harapkan pusat pemerintahan ada di Kalimantan Timur. Dan penataan pusat pemerintahan akan ramah lingkungan dan sudah layak ibu kota pusat pemerintahan di pindahkan ke ibu kota baru Kalimantan Timur, dan ibu kota lama DKI Jakarta menjadi pusat ekonomi” (Bandaman, 2021).

Perpindahan ibu kota juga harus di pikirkan atau di kaji dengan matang. Dilihat pertimbangan-pertimbangan yang matang atas perpindahan ibu kota. Dampak-dampak yang akan terjadi dengan perpindahan ibu kota juga harus di kaji dengan mendalam. Jangan sampai setelah perpindahan ibu kota akan timbul masalah-masalah baru di negara Indonesia.

Dampak kerusakan lingkungan jangan sampai terjadi di saat perpindahan ibu kota ini. Apalagi yang kita ketahui bahwa Kalimantan itu menjadi paru-paru dunia dengan hutannya. Dampak kerusakan lingkungan ini harus di kaji dengan sangat matang agar paru-paru dunia tidak rusak.

“Rencana pembangunan Ibu Kota Negara di kawasan hutan Kalimantan timur mengancam eksistensi pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia, karena berpotensi menyebabkan deforestasi. Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur di dalamnya. Selama ini dikenal sebagai “paru-paru dunia” karena luasnya hutan tropis di

pulau Kalimantan 40,8 jt ha. Dimana Kalimantan Timur menyumbang 12,6 jt ha (31%) kawasan hutan didalamnya” (Kamal, 2021)

Kita ketahui juga dahulu presiden pertama kita bercita-cita untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan tetapi pada saat ini harus di kaji ulang dengan dampak-dampak yang akan terjadi kalau perpindahan ibu kota tetap terjadi. Sekarang ini dunia sedang terancam dengan perubahan iklim dan Kalimantan menjadi pusat paru-paru dunia. Tata kota untuk pembangunan ibu kota baru harus melastarikan hutan setidaknya di buat hutan kota di ibu kota baru agar tidak merusak hutan Kalimantan.

“sekarang ini dengan kondisi dunia terancam dengan perubahan iklim, kita harus menimbang, Kalimantan salah satu paru-paru dunia. Jangan sampai mengalami deforestasi. Artinya pertimbangan yang dulu harus di hitung ulang. Bisa dijawab dengan membangun ibu kota dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Ada hutan kota di ibu kota baru (Kalimantan Timur)” (Kamal, 2021).

Ibu kota yang baru nanti ditargetkan tidak akan merusak hutan di Kalimantan. Karna di Kalimantan itu terdapat jutaan hektar hutan dan untuk membangun ibu kota baru hanya mengambil 400 hektar hutan. Pemerintah juga akan membuat kota yang ramah lingkungan adanya penanaman kembali hutan yang di tebang setelah terbangung infrastruktur.

“jutaan hektar, kalau di ambil 400 sampai 500 hektar tidak ada artinya. Itu bukan di gundul, memang saat pembangunan infrastruktur itu di tebang tetapi akan di buat penanaman pohon untuk ramah lingkungan. Ibu kota yang baru ini akan ramah lingkungan, kota hijau” (Bandaman, 2021).

Yang perlu di ketahui juga di Kalimantan Timur itu dekat dengan adanya terjadi konflik laut China Selatan (Natuna Utara). Setidaknya pemerintah harus berpikir panjang atas perpindahan ibu kota ini, karna konflik ini adalah konflik Internasional. Dan ketegangannya sangat tinggi di konflik ini. Pemerintah harus mengkaji-kaji lagi dari pertahanan dan keamanan negara ini, apabila terjadi perpindahan seharusnya pemerintah sudah menerka-nerka dampak dari pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dan jika terjadi perpindahan apakah aman atau tidak ibu kota baru nanti.

“ada konflik laut china selatan, bukan hanya natuna. Tetapi dikeseluruhan laut china selatan itu terjadi konflik tinggi. Salah satu lintas alur laut kita itu melawati antara Kalimantan dan Sulawesi itu alur laut kepulauan Indonesia. Artinya lintas laut kapal itu tinggi

sekali. Kalimantan timur ini menghadap langsung ke alur laut itu. Sekarang saja sudah banyak nelayan yang menemui drone kapal selam. Belum lagi di sinyalir kapal-kapal asing masuk. Artinya apa harus di pertimbangkan dari sisi pertahanan dan keamanan” (Kamal, 2021).

Dengan adanya konflik Internasional di sana setidaknya kita harus percaya dengan Tentara Nasional Indonesia. Kita juga memiliki armada yang kuat dan yang bisa mencegah konflik tersebut. TNI juga sudah beberapa kali memenangkan lomba tembak dunia bahkan juara pertama dan faktanya juga natuna itu memang milik negara Indonesia Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankannya dan menjaga keutuhan negara Indonesia.

“kalau secara negatif tidak ada dampak, kenapa kita harus takut?. Kita mempunyai armada, TNI yang kuat. Kenapa kita harus takut. Dan notabennya itu benar natuna itu punya kita. Ada hal prinsip negara Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif, juara tembak dunia TNI, masalah persenjataan kita sudah punya pindad, hanya saja Indonesia tak membuat tenaga nuklir, ingat TNI ini disegani, karna kahlian TNI kita tidak diragukan lagi. Apalagi perang grilia TNI terkuat.”(Bandaman, 2021)

Dengan adanya konflik ini benar pemerintah harus berpikir panjang untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apalagi ibu kota itu adalah jantungnya negara. Setidaknya ibu kota itulah harus aman dari konflik-konflik seperti ini.

Apalagi yang harus kita ketahui pembangunan ibu kota ini akan berdampak juga pada ekonomi Indonesia kedepan. Karna pembangunan ibu kota ini di Kalimantan memerlukan biaya yang bukan relatif dikit. Bahkan sampai 400 Triliun. APBN harus siap dengan ini jangan sampai ketika ibu kota pindah ekonomi Indonesia akan merosot.

“kondisi perekonomian kita sendiri. Apakah APBN kita memungkinkan untuk melakukan perpindahan ibu kota sekarang, apalagi sekarang ada covid 19. Kemarin juga sebelum ada pandemi APBN kita belum kuat. Jangan sampai dikorbankan hajat hidup orang banyak untuk pembangunan Infrastruktur. Karna pembangunan itu hakikatnya adalah keadilan. Adanya pemerataan. Jangan sampai nanti ibu kota nya bagus. Dan masih banyak yang kelaparan. Jadi harus dipastikan ekonomi. Karna akan terjadi penyedotan APBN besar-besaran akan ke pembangunan ibu kota” (Kamal, 2021).

Ekonomi memang hal sangat besar di perhitungkan dalam perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Jangan sampai dengan adanya kebijakan perpindahan ibu kota ini oleh presiden membuat ekonomi Indonesia semakin memburuk. Kita juga ketahui bahwasanya ibu kota baru akan bisa membuat perekonomian baru di Indonesia Timur, tetapi ahli ekonomi harus menghitung-hitung perekonomian Indonesia kedepan.

Dari kelima informan yang peneliti wawancara. Terjadinya pro dan kontra atas perpindahan ini. Pendapat yang pro dalam kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur antara lain, Mustafa Kamal, Zainal Abidin, Hagmar Bandaman, Romli Sa. Keempat informan ini menyetujui perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Satu informan yang tidak setuju dengan perpindahan ibu kota. Muhammad Ridwan.

Mustafa Kamal berpendapat, karna Indonesia ini negara kepulauan setidaknya harus ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu akan membuat pembangunan di daerah timur terbangun selain itu ibu kota akan terletak di pertengahan Indonesia, dan menghilangkan istilah Jawa Sentries.

Zainal Abidin berpendapat. Perpindahan ini pastinya sudah dipikirkan dampak positif dan negatif dari perpindahan ini. Zainal juga menyakini bahwa ini adalah kebijakan yang sudah di hitung matang oleh Pemerintah pusat. Zainal sebagai ketua DPRD Kota Palembang menyetujui adanya perpindahan ini.

Hagmar Bandaman berpendapat. Dengan adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, akan mengurangi kepadatan yang terjadi di Ibu kota. Apalagi dengan konsep Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan Kalimantan akan menjadi pusat pemerintahan.

Romli Sa berpendapat. Alasan perpindahan ini adalah kemacetan, dan bencana-bencana lain yang terjadi di Jakarta. Ibu kota juga harus di tempat strategis dan bebas bencana, baik itu berupa macet atau sebagainya. Oleh sebab itu Romli menyetujui perpindahan ini karna dengan perpindahan juga akan menciptakan ekonomi baru di Ibu kota baru (Kalimantan Timur).

Muhammad Ridwan tidak menyetujui dengan kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, karna menurut Muhammad Ridwan perpindahan ini akan menguras banyak anggaran dari APBN. Pemindahan ini juga akan merusak hutan yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu paru-paru dunia. Takutnya ada pembangunan ibu kota akan membuat paru-paru dunia ini akan menjadi rusak.

Berdasarkan penelitian di atas yang dilakukan oleh peneliti dan dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan publik maka hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, diperoleh hasil bahwa. Tanggapan para ahli politik menyetujui adanya perpindahan ibu kota tetapi dengan perhitungan yang matang, dan di perhatikan dampak-dampak dari perpindahan tersebut. Jangan sampai dengan perpindahan tersebut membuat masalah baru di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil wawancara terhadap informan (para ahli politik kota Palembang) peneliti yang telah di jelaskan pada bab IV tentang pembahasan. Maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti dari kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur bahwa :

1. Latar Belakang rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur antara lain : banyak nya masalah yang terjadi di Ibukota negara Indonesia sekarang, tepatnya di Jakarta, apalagi masalah-masalah besar seperti Macet, Banjir, Populasi Udara yang tidak sehat, Kekurangan Air Baku, dan Potensi Ancaman Gempa Bumi yang akan mengancam Jakarta. Oleh sebab itu, Presiden dan pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Tepatnya ke Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pandangan Politisi di Kota Palembang mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur :
 - a. Mayoritas dari informan yang peneliti teliti menyetujui adanya perpindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, tetapi pemerintah pusat harus memperhitungkan dengan matang apa-apa saja dampak yang akan terjadi jikalau memang ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur.
 - b. Pemerintah harus menyiapkan segala keperluan untuk perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, baik berupa Undang-undang dll.

B. Saran

1. Pemerintahan pusat dengan kebijakan perpindahan ibu kota ini jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan. Harus di kaji dengan matang perpindahan ini.
2. Pemerintahan pusat juga harus meminta pendapat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. jangan sampai menghilangkan demokrasi yang ada di negara Indonesia dengan mengambil keputusan tanpa dirapatkan di DPR RI.

3. Pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dalam perpindahan ibu kota ini harus diawasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Agar tidak ada yang bermain di kebijakan atau pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
4. Pembangunan ibu kota baru juga harus tetap menjaga kelestarian hutan yang ada di Kalimantan Timur.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), harus membahas ini dengan serius dan melihat sisi positif dan negatifnya. Jangan sampai anggota DPR RI ini hanya menyetujuinya saja dan tidak mau melihat dampak-dampaknya.
6. Terkhusus masyarakat Kalimantan Timur yang terkena dampak dari perpindahan ini harus berani untuk mengutarakan aspirasinya ke DPRD Kalimantan Timur.
7. Bagi peneliti selanjutnya, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan agar mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data. Agar mendapat hasil yang lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2017. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- Airlangga, B. 2019. *Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2019*. Jakarta : Nario Sari
- Anggara, S. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung : Cv Pustaka Setia
- Arwildayanto, dkk. 2018. *Analisis kebijakan pendidikan kajian teoritis, eksploratif, dan aplikatif*. Bandung : Cendekia Press
- BPPM. 2014. *Kajian keuangan Kalimantan Timur*. Kalimantan Timur
- BPS DKI Jakarta. 2020. *Provinsi DKI dalam angka 2020*. Jakarta : BPS DKI Jakarta
- BPS Kalimantan Timur. 2019. *Kalimantan Timur dalam angka*. Kalimantan Timur : BPS Kalimantan Timur
- CNBC Indonesia. com, (*Pindah ibu kota baru telan Rp. 466 T, uangnya dari mana saja*) di akses 2019
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo
- Fadhil, W. 2019. *Analisis pengurangan kemacetan berdasarkan sistem ganjil genap*. Bandung : ITB
- Ginting, S. 2015. *Kajian efektivitas pengendalian banjir di DKI Jakarta*. Bandung.
- Harsoyo, B. 2013. *Mengulas penyebab banjir di DKI Jakarta dari sudut pandang geologi, gemorflogi, dan morfometri sungai*. Jakarta.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang : Intrans Publishing
- Hukum.Online. com
- Hutasoit, W. L. 2018 dalam *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara* (hlm. 110). Samarinda
- Jeniawati, D. T. 2019. *Analisis rencana pemindahan ibu kota negara indonesia dari jakarta ke kalomantan timur*. Bandung
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijaka publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kompas. Com, (*ibu kota baru di sebagian penajam paser utara dan kutai kartanegara*) di akses 2019

Kompas.com (*setahun Jokowi Ma'ruf : rencana pemindahan ibu kota negara, nasibmu kini*) di akses 2020

Mulyadin, Dkk. 2018. *Konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya*. Bogor

Nugroho, S.P. 2002. *Evaluasi dan analisis curah hujan sebagai faktor penyebab bencana banjir Jakarta*. Jakarta

Prisgunanto, I. 2017. *Aplikasi teori dalam sistem komunikasi di Indonesia*. Jakarta : Kencana

A Subagyo, U Madjid, 2019. *Kaidah tentang Rencana tata ruang wilayah (RTRW) pertahanan pada ibukota baru Republik Indonesia*. Widya Praja

Sutikno, 2007. *Perpindahan ibu kota negara suatu keharusan atau wacana*. Jawa Timur

Sugiono, 2017. *Merode penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiono, 2018. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Switri, S. 2011. *Konsep dasar kebijakan Publik*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponogoro

Suyuti, R. 2012. *Implementasi intelegent transportasion syistem untuk mengatasi kemacetan Jakarta*. Jakarta

Tempo.com. (*lima alasan jokowi pindahkan ibu kota ke Kalimantan*). Diakses taun 2019

Triyana Henni, 2013. *Perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946*, Surabaya

Toun, N. R. 2018. *Analisis kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacan pemindahan ibu kota negara republik indonesia ke kota palangkaraya* (hlm. 129). Academia Praja

Tribunnews.com

Taufiq, M. 2017. *Pemindahan ibu kota dan p||||otensi konektivitas pemerataan ekonomi* (hlm. 99 – 114). Bandung : Program pendidikan vokasi Universitas Indonesia.

Usmaya dkk, 2017. *Pemerintahan darurat republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat tahun 1948-1949*. Bandar Lampung

H.M Yahya, 2018. *Pemindahan ibukota negara maju dan sejahtera*. Jawa Timur, Universitas merdeka Malang

Wahab, S.A. 2012. *Analisis kebijakan dan formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi perkasa

Wahab, S.A. 2005. *Analisis kebijakan : dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Perkasa

Yamali, F.R. 2020. *Dampak covid terhadap ekonomi Indonesia*. Jambi : Universitas Batanghari

Yohana, Dkk. 2017. *Penerapan pembuatan teknik lubang biopori resapan sebagai upaya pengendalian banjir*. Jakarta

Detikfinace.com. (*jokowi mantap pindahkan ibu kota ke Kalimantan*). Di akses 2019

m.liputan6.com. (*4 fakta penyebab banjir yang melanda di Jakarta*). Di akses 2020

Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Alfa Beta

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia seperti wacana yang ada?
2. Dari perspektif politik, apakah rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia tersebut merupakan hal yang positif?
3. Bagaimana rencana tersebut di tinjau dari keamanan dan pertahanan?
4. Dampak apakah yang mungkin timbul dari perpindahan ibu kota?
5. Bagaimana pengamatan bapak selaku mengenai keberlanjutan rencana pemindahan ibu kota?

DOKUMENTASI

Dokumentasi ini berupa foto terakhir setelah melakukan wawancara bersama ahli politik di Kota Palembang.



1. Bapak Muhammad Ridwan (Anggota DPRD Kota Palembang)



2. Mustafa Kamal (Anggota DPR RI)



3. Zainal Abidin (Ketua DPRD Kota Palembang)



4. Hagmar Bandaman (Politikus Partai PDIP)



5. Romli SA (Ketua PW Muhammadiyah SUMSEL)

